

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

TAHUN
2021



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SERANG**

Jalan. Sama'un Bakri Telp. (054) 200363

KATA PENGANTAR

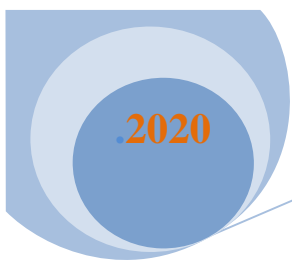
Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa bernegara untuk itu, diperlukan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah azas akuntabilitas, Azas ini merupakan azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, Dasar Hukum yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah UU No 17 / 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 / 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan sistem AKIP, Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja serta diikuti peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Dalam rangka pelaksanaan UU No 17 / 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 / 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan sistem AKIP, Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja serta

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Lingkungan Strategis	2
C. Tujuan dan Manfaat LKIP	6
D. Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SERANG	42
A. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Serang	42
B. Faktor Penentu Keberhasilan	48
C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	49
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	50
E. Rencana Kinerja Tahunan	51



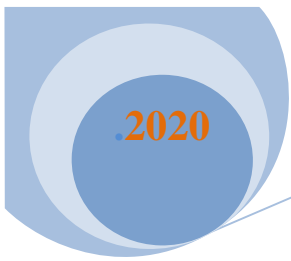
F. Perjanjian Kinerja	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SERANG	54
A. Kerangka pengukuran kinerja	54
B. Capaian pengukuran kinerja/ kinerja sasaran strategis	54
C. Evaluasi capaian kinerja Sasaran Strategis	57
D. Realisasi Anggaran	71
E. Dampak Terhadap Sasaran Strategis	81
BAB IV PENUTUP	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Serang berdasarkan tingkat pendidikan	2
Tabel 1.2	Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang berdasarkan jenjang kepangkatan	3
Tabel 1.3	Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Serang berdasarkan jenis kelamin dan golongan	3
Tabel 1.4	Jumlah PNS yang akan masuk pensiun periode 2019 – 2021	4
Tabel 1.5	Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang	4
Tabel 1.6	Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR.....	12
Tabel 1.7	Jumlah dan Distribusi Pegawai DPUPR Kab Serang menurut Status Pegawai Tahun 2021	13
Tabel 1.8	Data Kondisi Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	37
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	45
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	50
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	51
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang.....	10
Gambar 1.2	Struktur Organisasi UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	11
Gambar 3.1	Grafik perbandingan target dan capaian IKU 2021.....	56
Gambar 3.2	Rekonstruksi Jalan Kadugenep - Panunggulan (DAU)	60
Gambar 3.3	Rekonstruksi Jalan Mandaya – Walikukun (DAU)	61
Gambar 3.4	Pelebaran Jembatan Nyompok Desa Nyompok	63
Gambar 3.5	Pembangunan Jembatan Sukaratu Tahap 2	63
Gambar 3.6	D. I. Cicongkok (DAU)	64
Gambar 3.7	D. I. Talagawangsa (DAU)	65
Gambar 3.9	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kab. Serang	66



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : TABEL FORMULIR PERJANJIAN
KINERJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang Tahun 2021 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 / 2003 tentang keuangan Negara
2. Undang – Undang Nomor 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – Undang Nomor 15 / 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Tentang Pembentukan Provinsi Banten
5. Undang – Undang Tentang Pemerintah Daerah
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
8. Peraturan Presiden Nomor 29 / 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 / 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 107 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan uraian tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang

B. Lingkungan Strategis

1. Letak Geografis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Serang terletak di tengah Kota Serang yaitu di Jalan Sama'un Bakri Serang.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 200 orang, hal ini sebagai penunjang keberhasilan program-program penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, adapun rincian PNS sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<i>Pendidikan Terakhir</i>	<i>Jumlah Pegawai</i>		
	<i>L</i>	<i>P</i>	<i>Total</i>
<i>Sekolah Dasar (SD)</i>	18	0	18
<i>Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)</i>	6	0	6
<i>Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)</i>	61	7	68
<i>Diploma I</i>	0	0	0
<i>Diploma II</i>	0	0	0
<i>Diploma III</i>	5	6	11
<i>Sarjana Muda</i>	0	0	0
<i>Sarjana Strata – 1</i>	57	23	80
<i>Sarjana Strata – 2</i>	14	3	17
<i>Sarjana Strata – 3</i>	0	0	0
<i>Total</i>	161	39	200

Sumber : Subag Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Serang

Tabel 1.2
Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang
Berdasarkan
Jenjang Kepangkatan

Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)					Jumlah (Orang)
	A	B	C	D	E	
<i>Golongan I</i>	0	3	0	13	-	16
<i>Golongan II</i>	7	15	33	31	-	86
<i>Golongan III</i>	48	5	20	16	-	89
<i>Golongan IV</i>	8	1	0	0	-	9
Total						200

Sumber : Subag Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Serang

Tabel 1.3
Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang
Berdasarkan Jenis Kelamin

Umur	Jenis Kelamin		Total
	L	P	
<20 Tahun	0	0	0
21 – 25 Tahun	3	6	9
26 – 30 Tahun	10	9	19
31 -35 Tahun	12	3	15
36 – 40 Tahun	17	3	20
41 – 45 Tahun	26	7	33
46 – 50 Tahun	38	4	42
51 – 55 Tahun	40	7	47
56 – 60 Tahun	15	0	15
Total	161	39	200

Sumber : Subag Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Serang

Tabel 1.4
Jumlah PNS Yang Akan Memasuki Pensiun

NO	TAHUN	JUMLAH PEGAWAI
1.	2021	17
2.	2022	5
3.	2023	10
4.	2024	12
5.	2025	11
TOTAL		55

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Serang

Tabel 1.5
Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

Golongan		Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
Golongan I	I/a	-	-	0
	I/b	3	-	3
	I/c	0	-	0
	I/d	13	-	13
Golongan II	II/a	7	0	7
	II/b	10	5	15
	II/c	28	5	33
	II/d	29	2	31
Golongan III	III/a	33	15	48
	III/b	3	2	5
	III/c	17	3	20
	III/d	11	5	16
Golongan IV	IV/a	6	2	8

	IV/b	1	0	1
	IV/c	0	0	0
	IV/d	0	0	0
Total		161	39	200

Berdasarkan uraian diatas, tingkat pendidikan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang relatif masih rendah dan latar belakang pendidikan yang kurang sesuai dengan kebutuhan. Sekitar 46 % tingkat pendidikan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang masih di dominasi oleh lulusan SLTA. Guna menghadapi tantangan ke depan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang terus melakukan upaya untuk meningkatkan skill dan ketrampilan para pegawai serta upaya peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme khususnya bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang melalui kursus-kursus, diklat-diklat teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan golongan ruang, pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didominasi golongan III yaitu 89 orang atau sebesar 44,5 % sedangkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan yaitu 161 orang sedangkan pegawai perempuan 39 orang. Untuk 5 tahun ke depan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan mengalami kekurangan pegawai jika tidak diimbangi dengan penambahan pegawai setiap tahunnya karena setiap tahun banyak pegawai yang memasuki usia pensiun. Untuk tahun 2021 pegawai yang pensiun sebanyak 17 pegawai, sedangkan total sampai dengan tahun 2025 sebanyak 55 pegawai. Harapan ke depan calon pegawai negeri sipil dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang harus berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi dan berkualitas.

C. Tujuan dan Manfaat LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang mempunyai tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan disusunnya LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang adalah sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

b. Manfaat

1. Sebagai peningkatan akuntabilitas instansi,
2. Sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi,
3. Sebagai peningkatan perencanaan disegala bidang program, kegiatan penggunaan sumber daya organisasi instansi,
4. Sebagai peningkatan kredibilitas instansi yang lebih tinggi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instansi,
5. Sebagai media untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi,
6. Sebagai media pendorong dalam penyelenggaraan tujuan umum pemerintahan dan pembangunan secara baik,
7. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

D. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008** tentang **Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang**. Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan **Peraturan Bupati Serang Nomor 107 Tahun 2016** tentang **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang**. Berpijak dari kebijakan daerah tersebut, kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas membawahi 200 orang PNS, 2 orang TTK dan 114 orang TKS.

1. Tugas Pokok

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang mempunyai **tugas pokok** merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang meliputi bidang pengelolaan sumber daya air, irigasi, kebinamargaan, bina teknik, bidang tata ruang serta menyelenggarakan kesekretariatan dinas berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang mempunyai **fungsi** :

- Perencanaan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Pengaturan penyelenggaraan sebagian tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan penyelenggaraan sebagian tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pengawasan penyelenggaraan sebagian tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan tugas tambahan

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 107 Tahun 2016 susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang terdiri atas :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Pembangunan;
 - c. Seksi Pemeliharaan
4. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Situ, Rawa dan Pantai;
 - c. Seksi Pengendalian
5. Bidang Irigasi, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - c. Seksi Bina Manfaat.

6. Bidang Bina Teknik, membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran
 - b. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Seksi Jasa Konstruksi

7. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan tata ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan dan pengawasan
 - c. Seksi Pertanahan

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan Jalan dan SDA, terdiri dari :
 - a. UPT Kramatwatu (Kecamatan Kramatwatu, Waringin Kurung, Bojonegara, Pulo Ampel)
 - b. UPT Anyer (Kecamatan Anyer, Cinangka, Mancak)
 - c. UPT Ciomas (Kecamatan Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Gunung Sari)
 - d. UPT Petir (Kecamatan Petir, Baros, Tunjung Teja)
 - e. UPT Pontang (Kecamatan Pontang, Tirtayasa)
 - f. UPT Pamarayan (Kecamatan Pamarayan, Cikeusal, Bandung)
 - g. UPT Ciruas (Kecamatan Ciruas, Kragilan, Lebak Wangi)
 - h. UPT Cikande (Kecamatan Cikande, Jawilan, Binuang, Kopo)
 - i. UPT Kibin (Kecamatan Kibin, Tanara, Carenang)
 - j. UPT Peralatan & Perbengkelan
 - k. UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi
 - l. UPT Bendung Pamarayan

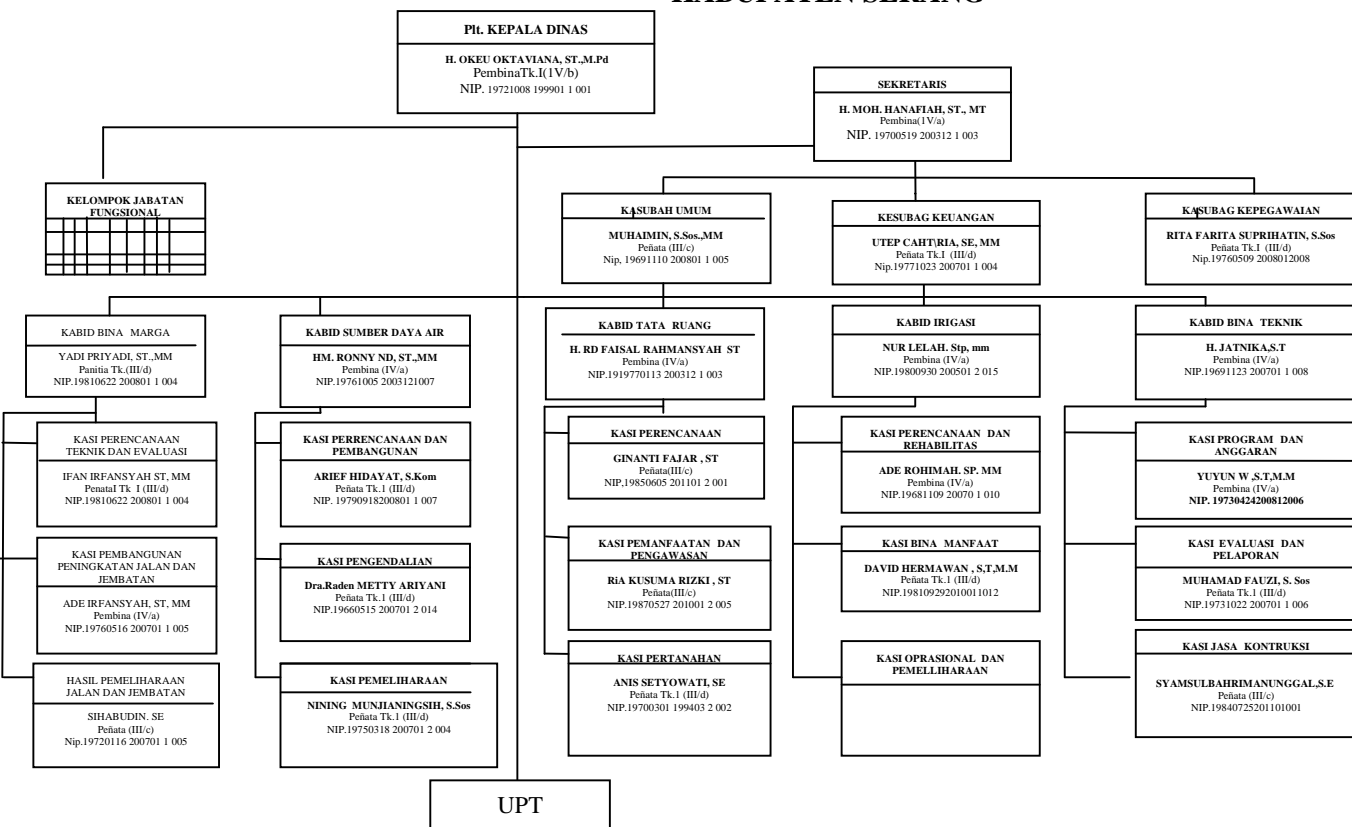
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang dapat diilustrasikan dalam skema flowchart pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SERANG

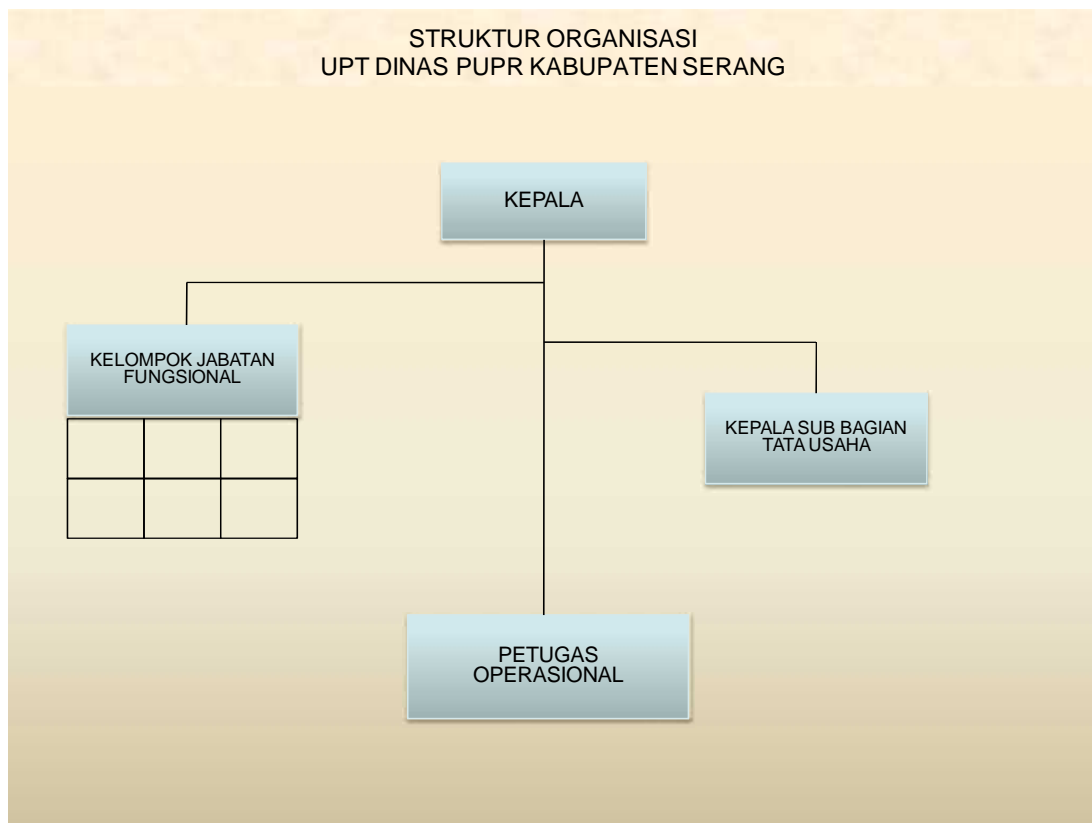


Sumber : Perbup Kabupaten Serang No. 107 Tahun 2016

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, UPT Peralatan & Perbengkelan, UPTD Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi dan UPTD Bendung Pamarayan terdiri dari :

1. Kepala
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Petugas Operasional
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.2



Sumber : Perbup Kabupaten Serang No. 26 Tahun 2009

Tabel 1.6

Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

No.	Nama Organisasi	Wilayah Kerja
1.	UPT Pekerjaan Umum Cikande	Kecamatan Cikande Kecamatan Jawilan Kecamatan Binuang Kecamatan Kopo
2.	UPT Pekerjaan Umum Kibin	Kecamatan Kibin Kecamatan Tanara Kecamatan Careng
3.	UPT Pekerjaan Umum Pontang	Kecamatan Pontang Kecamatan Tirtayasa
4.	UPT Pekerjaan Umum Ciruas	Kecamatan Ciruas Kecamatan Kragilan Kecamatan Lebak Wangi
5.	UPT Pekerjaan Umum Ciomas	Kecamatan Ciomas Kecamatan Pabuaran Kecamatan Padarincang Kecamatan Gunung Sari
6.	UPT Pekerjaan Umum Pamarayan	Kecamatan Pamarayan Kecamatan Cikeusal Kecamatan Bandung
7.	UPT Pekerjaan Umum Petir	Kecamatan Petir Kecamatan Baros Kecamatan Tunjung Teja
8.	UPT Pekerjaan Umum Anyer	Kecamatan Anyer Kecamatan Cinangka Kecamatan Mancak
9.	UPT Pekerjaan Umum Kramatwatu	Kecamatan Kramatwatu Kecamatan Waringin kurung Kecamatan Bojonegara Kecamatan Pulo Ampel

Sumber : Perbup Kabupaten Serang No. 26 Tahun 2009

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PUPR Kabupaten Serang didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang terdistribusi menurut bidang, kesekretariatan dan unit-unit pelaksana teknis dinas. Pada tahun 2021, jumlah pegawai Dinas PUPR Kabupaten Serang adalah sebanyak 316 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 63,3 % atau 200 orang berstatus Aparatur Sipil Negara

(ASN), 0,63 % atau 2 orang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK), 36,08 % atau 114 orang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Jumlah dan distribusi pegawai Dinas PUPR Kabupaten Serang menurut status dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 1.7
Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Serang Menurut Status Pegawai Tahun 2020

No.	Bidang Tugas	Status Pegawai			Jumlah Pegawai	Ket
		ASN	TKK	TKS		
I	SEKRETARIAT					
1.1	Sub Bagian Umum	7	1	25	33	
1.2	Sub Bagian Keuangan	7	-	7	14	
1.3	Sub Bagian Kepegawaian	3	-	4	7	
	JUMLAH I	17	1	36	54	
II	BIDANG BINA MARGA					
2.1	Seksi Perencanaan Teknik	13	-	7	20	
2.2	Seksi Pembangunan	16	-	5	21	
2.3	Seksi Pemeliharaan	5	-	16	21	
	JUMLAH II	34	0	28	62	
III	BIDANG PENGELOLAAN SDA					
3.1	Seksi Perencanaan dan Pembangunan	8	-	3	11	
3.2	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Situ, Rawa dan Pantai	3	1	3	7	
3.3	Seksi Pengendalian	4	-	1	5	
	JUMLAH III	15	1	7	23	
IV	BIDANG IRIGASI					
4.1	Seksi Perencanaan dan Pembangunan	9	-	2	11	
4.2	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	4	-	2	6	
4.3	Seksi Bina Manfaat	3	-	2	5	
	JUMLAH IV	16	0	6	22	
V	BIDANG BINA TEKNIK					
5.1	Seksi Penyusunan Program dan Anggaran	3	-	2	5	
5.2	Seksi Pengolahan Data, Evaluasi & Pelaporan	2	-	1	3	
5.3	Seksi Jasa Konstruksi	2	-	3	5	
	JUMLAH V	7	0	6	13	
VI	BIDANG TATA RUANG					
6.1	Seksi perencanaan tata ruang	5	-	2	7	
6.2	Seksi pemanfaatan dan pengawasan	3	-	2	5	
6.3	Seksi Pertanahan	6	-	2	8	
	JUMLAH VI	14	0	6	20	
VII	UPTD					
7.1	Kramatwatu	10	-	-	10	
7.2	Anyar	4	-	1	5	
7.3	Ciomas	8	-	-	8	
7.4	Petir	5	-	-	5	
7.5	Pontang	10	-	2	12	
7.6	Pamarayan	7	-	3	10	
7.7	Ciruas	12	-	1	13	
7.8	Cikande	8	0	2	10	
7.9	Kibin	6	-	2	6	

7.10	Peralatan	17	-	11	28	
7.11	Laboratorium	6	-	3	9	
7.12	Bendung	6	-	-	6	
JUMLAH VII		97	0	25	122	
TOTAL		200	2	114	316	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian-Desember 2020

Berikut ini diuraikan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kabupaten Serang. Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Serang Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. Untuk kelancaran pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang berpedoman pada tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi ini digunakan sebagai landasan kerja masing-masing, agar dalam pelaksanaannya terdapat kejelasan dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang;

- a. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. Pengawasan Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- d. Pelaksanaan tugas tambahan.

II. Sekretariat Dinas

Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Kesekretariatan Dinas;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Umum Dinas. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum Dinas;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum Dinas;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum Dinas;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian Dinas. Sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

III. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga. sehingga kegiatan di Bidang Bina Marga berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Marga, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Perencanaan Teknis. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Perencanaan Teknis;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Perencanaan Teknis;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Perencanaan Teknis;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Perencanaan Teknis; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Marga, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pembangunan. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pembangunan;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pembangunan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pembangunan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Seksi Pemeliharaan

Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Marga, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pemeliharaan jalan dan jembatan. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

IV. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang kepala bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. sehingga kegiatan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan

Seksi Perencanaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Pembangunan. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Pembangunan;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Pembangunan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Pembangunan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Seksi Pemeliharaan

Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan Sumber Daya Air. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Seksi Pengendalian

Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pengendalian Sumber Daya Air. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pengendalian Sumber Daya Air;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pengendalian Sumber Daya Air;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pengendalian Sumber Daya Air;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pengendalian Sumber Daya Air; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

V. Bidang Irigasi

Bidang Irigasi dipimpin oleh seorang kepala bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Irigasi. sehingga kegiatan di Bidang Irigasi berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Irigasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Irigasi;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Irigasi;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Irigasi;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Irigasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Seksi Perencanaan dan Rehabilitasi

Seksi Perencanaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Irigasi, yang

mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Perencanaan dan rehabilitasi irigasi. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Perencanaan dan Rehabilitasi Irigasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Rehabilitasi Irigasi;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Rehabilitasi Irigasi;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Rehabilitasi Irigasi;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Rehabilitasi Irigasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Irigasi, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Situ, Rawa dan Pantai mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan

3. Seksi Bina Manfaat

Seksi Bina Manfaat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Irigasi, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Bina Manfaat Irigasi. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Bina Manfaat Irigasi;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Bina Manfaat Irigasi;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Bina Manfaat Irigasi;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Bina Manfaat Irigasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

VI. Bidang Bina Teknik

Bidang Bina Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Teknik. sehingga kegiatan di Bidang Bina Teknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Teknik;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Teknik;

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Teknik;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Teknik;
dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran

Seksi Penyusunan Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Teknik, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Penyusunan Program dan Anggaran. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penyusunan Program dan Anggaran;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penyusunan Program dan Anggaran;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Teknik, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Evaluasi dan Pelaporan Dinas. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Evaluasi dan Pelaporan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Seksi Jasa Konstruksi

Seksi Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Teknik, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Jasa Kontruksi. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Jasa Kontruksi;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Jasa Kontruksi;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Jasa Kontruksi;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Jasa Kontruksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

VII. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Ruang. sehingga kegiatan di Bidang Tata Ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Tata Ruang;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Tata Ruang;

2. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Tata Ruang;

3. Seksi perencanaan Tata Ruang

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Tata Ruang, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan perencanaan Tata Ruang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan Tata Ruang
- b. Mengatur penyelenggaraan urusan perencanaan Tata Ruang
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan Tata Ruang
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan Tata Ruang
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

4. seksi pemanfaatan dan pengawasan

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Tata Ruang, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan pengawasan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi pemanfaatan dan pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan pengawasan Tata Ruang
- b. Mengatur penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan pengawasan Tata Ruang
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan pengawasan Tata Ruang
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan pengawasan Tata Ruang
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

5. Seksi Pertahanan

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Tata Ruang, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan pertahanan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi pertahanan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertahanan Tata Ruang
- b. Mengatur penyelenggaraan urusan pertahanan Tata Ruang
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertahanan Tata Ruang
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan pertahanan Tata Ruang
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

VIII. UPT PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air dalam wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan dalam bidang jalan dan jembatan yang berada di wilayahnya.
- b. Pelaksanaan pengawasan bantuan aspal desa
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan dalam bidang Sumber Daya Air dan Irigasi yang berada di wilayahnya.
- d. Pelaksanaan verifikasi program-program yang diusulkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi Kepegawaian, perlengkapan dan keuangan di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum dan penataan ruang

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada UPTD Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan organisasi UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Kepala dalam hal :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran gaji dan perjalanan dinas
- b. Mengelola kepegawaian

- c. Memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya
- d. Mengelola keuangan

3. Petugas Operasional

Petugas Operasional mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dalam hal :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan dalam bidang jalan dan jembatan yang berada di wilayahnya
- b. Melaksanakan pengawasan bantuan aspal desa
- c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan dalam bidang sumber daya air dan irigasi yang berada di wilayahnya
- d. Melaksanakan verifikasi program-program yang diusulkan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

IX. UPT PERALATAN & PERBENGKELAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 57 tahun 2008, UPT Peralatan & perbengkelan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Peralatan mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam hal pengelolaan dan Pemeliharaan Operasional Peralatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala UPT Peralatan & Perbengkelan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan peralatan, kendaraan dan perlengkapan lainnya
- b. Pelaksanaan pelayanan kebutuhan peralatan dan kendaraan kepada pengguna jasa

- c. Pemeliharaan peralatan, kendaraan, perlengkapan dan prasarana bangunan kerja
- d. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan
- e. Pengelolaan kegiatan ketatausahaan

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada UPT Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Kepala dalam hal :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran gaji dan perjalanan dinas
- b. Mengelola kepegawaian
- c. Memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya
- d. Mengelola keuangan

3. Petugas Operasional

Petugas Operasional mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan bimbingan teknis di bidang peralatan.

- a. Mengurus semua kendaraan dan peralatan termasuk alat kelengkapannya
- b. Mengoperasikan kendaraan dan peralatan termasuk alat kelengkapannya sesuai dengan tingkat kebutuhannya
- c. Menyelenggarakan administrasi pergudangan
- d. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala dan atau sewaktu-waktu yang sifatnya segera kepada kepala

- e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada kepala mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pengelolaan tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. UPT PENGUKURAN DAN PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 53 tahun 2008 tentang Pembentukan UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam hal penelitian dan pengujian mutu bahan/material di bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional di bidang UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi pekerjaan umum.
- b. Pelaksanaan penelitian mutu bahan/material di bidang pembangunan fisik kebinamargaan dan konstruksi bangunan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengujian mutu bahan/material yang akan dipergunakan dalam pembangunan fisik di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang lainnya.
- d. Pengurusan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, perlengkapan dan keuangan di lingkungan UPTD Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- f. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan dinas di lingkungan UPTD Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta khususnya yang berhubungan dengan bidang tugas UPTD Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada UPTD Laboratorium adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Laboratorium di bidang penelitian dan pengujian mutu bahan atau material serta pengurusan dan pemeliharaan peralatan Laboratorium Pekerjaan Umum untuk kepentingan pembangunan fisik pekerjaan umum dan Penataan Ruang lainnya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Kepala dalam hal :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran gaji dan perjalanan dinas
- b. Mengelola kepegawaian
- c. Memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya
- d. Mengelola keuangan

3. Petugas Operasional

- a. Menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan bimbingan teknis di bidang Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- b. Petugas Operasional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
1. **Petugas Operasional Penelitian dan Pengujian**, mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada kepala dalam hal :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi penelitian dan pengujian di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengujian terhadap mutu bahan/material untuk kepentingan pembangunan fisik kebinamargaan yang meliputi pembuatan/pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lain yang ada hubungannya dengan aspek pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta konstruksi bangunan lainnya
 - c. Melaksanakan penelitian dan pengujian di lapangan terhadap mutu bahan/material yang dipergunakan
 - d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengujian kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. **Petugas Operasional Peralatan**, mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada kepala dalam hal :
 - a. Menyusun rencana dan analisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan laboratorium pekerjaan umum dan Penataan Ruang
 - b. Menyelenggarakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran peralatan atau perlengkapan laboratorium sesuai dengan kebutuhan
 - c. Melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan seluruh peralatan atau perlengkapan laboratorium pekerjaan umum dan Penataan Ruang
 - d. Menyiapkan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian atau perlengkapan laboratorium pekerjaan umum dan Penataan Ruang

- e. Menyampaikan laporan kegiatan pengurusan dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan laboratorium pekerjaan umum dan Penataan Ruang

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

XI. UPTD BENDUNG PAMARAYAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 54 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Bendung. UPT Bendung Pamarayan adalah Unit Pelaksana Teknis, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT Bendung Pamarayan mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam hal pengamanan dan pemeliharaan Bendung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala UPT Bendung Pamarayan mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan penyediaan air baku dan pendistribusian air;
- b. Pengoperasian, pemeliharaan bendung dan fasilitasnya;
- c. Pengamanan konstruksi bendung
- d. Pengawasan, pencegahan dan pengendalian terhadap bencana banjir dan kekeringan;
- e. Pengelolaan kegiatan ketatausahaan

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada UPT Bendung Pamarayan adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan organisasi UPTD Pekerjaan Umum.

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Kepala dalam hal :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran gaji dan perjalanan dinas
- b. Mengelola kepegawaian
- c. Memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Mengelola keuangan

3. Petugas Operasional

Petugas Operasional mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan bimbingan teknis di bidang Bendung

- a. Menyusun rencana dan analisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan Bendung
- b. Melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan seluruh peralatan atau perlengkapan bendung
- c. Menyiapkan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian atau perlengkapan bendung
- d. Menyampaikan laporan kegiatan pengurusan dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan bending

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Lingkungan Setrategis Yang Berpengaruh

Perubahan Paling mutahir pada dekade awal abad 21 bagi bangsa kita sebagaimana bangsa-bangsa yang lain di dunia adalah peningkatan tuntutan demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi dan dituntut pula untuk melaksanakan

kepemrintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi (*cleen governmant*).

Dari beberapa tuntutan diatas dan dengan berbagai implikasi dan konsekuensinya harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa pada masa kini dan masa mendatang.

Selanjutnya dengan demokratisasi adalah tuntutan demokratisasi regional atau desentralisasi sebagai perwujudan dan hak-hak masyarakat di daerah yaitu untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya, sedangkan desentralisasi adalah pilihan terbaik dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah akan semakin efisien dan demokratis, sebab dengan adanya hak dan kewajiban serta wewenang mengurus rumah tangga daerah oleh daerah, maka jarak berbagai pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik semakin dekat dan semakin intern. Terselenggaranya pelayanan prima dan pengelolaan kebijakan secara konsisten, efisien dan efektif merupakan elemen paling penting dalam pemerintahan dan merupakan hakekat dasar yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Penanganan kegiatan dalam bidang kebinamargaan meliputi penanganan seluruh aset jalan dan jembatan yang terdapat di Kabupaten Serang. Aset jalan ini meliputi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Panjang ruas jalan Kabupaten Serang mengalami penurunan dengan dibentuknya Pemerintah Kota Serang, sehingga aset jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kota Serang saat ini penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Serang.

Dalam penanganan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Serang dibagi menjadi beberapa kriteria atau jenis perbaikan permukaan jalan yaitu Lapisan Hotmix, Lapisan Penetrasi (Lapen), Perkerasan/agregat/kerikil, permukaan jalan batu, dan permukaan jalan tanah. Dengan adanya kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan ini, secara keseluruhan kondisi permukaan jalan akan berbanding terbalik dengan kondisi jalan sebelumnya, misalnya

dengan meningkatnya jalan yang di Hotmix, akan menurunkan panjang jalan yang memakai lapis permukaan Lapen.

Bidang Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serang, dalam kegiatannya difokuskan untuk membangun dan memelihara seluruh saluran irigasi yang ada di Kabupaten Serang serta memelihara dan mengembangkan sumber-sumber daya air baik yang berupa rawa, ranca, waduk dan kali.

Tabel 1.8
Data Kondisi Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum

No	Uraian	Sat.	Keadaan Tahun			
			2018	2019	2020	2021
I	Infrastruktur Jalan dan Jembatan					
1.	Jalan Kabupaten					
	Panjang Jalan dalam kondisi baik	Km	432,81	491,64	513,31	576,55
	Panjang Jalan dalam kondisi sedang	Km	66,19	46,65	28,25	9,00
	Panjang Jalan dalam kondisi buruk	Km	102,13	72,04	68,77	15,58
	Jumlah :	Km	601,13	610,33	610,33	601,13
	Panjang Jalan dalam kondisi Hotmix	Km	168,58	121,99	61,70	11,35
	Panjang Jalan dalam kondisi Lapen	Km	0	0	0	0
	Panjang Jalan dalam kondisi Tanah	Km	16,35	2,44	0	0
	Panjang Jalan dalam Kondisi Batu/kerikil	Km	49,81	19,68	34,65	5,66
	Panjang Jalan dalam Kondisi Beton	Km	366,39	466,22	513,98	584,12
	Jumlah :	Km	601,13	610,33	610,33	601,13
2.	Jalan Desa/ Lingkungan					
	Panjang Jalan dalam kondisi baik	Km	911,64	915,17	937,17	960,17
	Panjang Jalan dalam kondisi sedang (Kerikil)	Km	79,25	75,15	64,15	41,15

	Panjang Jalan dalam kondisi buruk (tanah,dll)	Km	874,11	866,48	863,48	863,48
	Jumlah :	Km	1.865	1.865	1.865	1.865
3.	Jembatan					
	Kondisi Baik	bh	134	152	154	165
	Kondisi Sedang	bh	31	0	0	0
	Tidak Layak	bh	0	13	11	0
	Jumlah :	bh	165	165	165	165
4.	Drainase					
	Kondisi Baik	km	83,92	87,12	87,12	93,65
	Tidak Layak	km	109,17	29,88	29,88	6,53
	Jumlah :	Km	117	117	117	117
No	Uraian	Sat.				
II	Infrastruktur Irigasi					
1	Jaringan Irigasi					
	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Ha	18.409,71	18.678,70	18.805,59	18.919,10
	Jaringan Irigasi dalam kondisi sedang	Ha	288,61	92,31	41,01	0
	Jaringan Irigasi dalam kondisi rusak berat	Ha	220,79	148,09	72,51	0
	Jumlah :		18.919,10	18.919,10	18.919,10	18.919,10
III	Infrastruktur Sumber Daya Air					
1	SITU/ EMBUNG (26 Lokasi)					
	SITU/ EMBUNG Besar & Kecil Kondisi Baik	BH	6	7	15	15
	SITU/ EMBUNG Besar & Kecil Kondisi Rusak	BH	65	64	56	56
	Jumlah :		71	71	71	71
2	Rawa (12 Lokasi)					
	Rawa Kondisi Baik	BH	13	13	13	13
	Rawa Kondisi Rusak	BH	35	35	35	35
	Jumlah :		48	48	48	48

4	Pembuang/ Sungai					
	Sal. Pembuang/Sungai Kondisi Baik	BH	210	220	249	249
	Sal. Pembuang/Sungai Kondisi Rusak Berat	BH	87	114	85	85
	Jumlah :		334	334	334	334
	Mata Air	BH	57	57	57	57
	Jumlah :		57	57	57	57

Sumber : Bidang Bina Marga, Irigasi dan SDA

Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kabupaten Serang yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Kekuatan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
 - Pengakuan eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Kabupaten Serang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Kejelasan kewenangan (tupoksi) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
 - Ketersediaan sumberdaya manusia aparat yang jumlahnya cukup memadai;
 - Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang bagi pelaksanaan tugas dan pekerjaan;
 - Dukungan kinerja kelembagaan yang baik.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
- Belum memadainya dukungan kualitas sumberdaya manusia aparat yang mempunyai latar belakang pendidikan, kompetensi dan pengalaman di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- Belum memadainya ketersediaan (kecukupan) dan daya dukung sarana dan prasarana kerja;
- Kurang terpadunya pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- baik dalam lingkup vertikal maupun horizontal;
- Terbatasnya dukungan ketersediaan data dan informasi secara lengkap, akurat dan *up to date*;
- Masih kurangnya pengawasan dan pengendalian pembangunan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

Analisis Lingkungan Eksternal**a. Peluang (*Opportunities*)**

- Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Kabupaten Serang. Peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang strategis sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah;
- Semakin berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- Dukungan ketersediaan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah sebagai pegangan dan acuan dalam rangka pembangunan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- Semakin terbukanya kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak;
- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

b. Ancaman (*Threats*)

- Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Kabupaten Serang. Ancaman yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Belum meratanya pembangunan urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- Kerusakan dan penurunan daya dukung lingkungan akibat adanya pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- Gejala bencana alam seperti gempa, longsor, banjir, dan tsunami yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak bisa diperkirakan kejadiannya;

Semakin tingginya tingkat persaingan antar daerah dalam upaya membangun daerahnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang sebagai unsur pembantu Bupati Sekretariat Daerah telah menetapkan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran serta pencapaian tujuan dan sasaran.

A. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Serang

A.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Serang yang memiliki otoritas pada urusan : pekerjaan umum

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Serang pada urusan : pekerjaan umum dan Penataan Ruang seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan : pekerjaan umum dan penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**" TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN AGAMIS".**

Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas berakhlak mulia dan berbudaya.
2. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local serta memperkuat struktur perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bertanggung jawab, dan melayani didukung dengan aparatur birokrasi yang berintegritas dan professional
6. Memanfaatkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tersebut an untuk mengidentifikasi factor – factor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Serang tersebut.

Hal identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang tentang factor – factor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu – isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. Dengan demikian, isu – isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan factor – factor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil telaahan misi, terdapat 2 (dua) rumusan misi daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta perlu mendapat dukungan dan diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang meliputi :

1.	Misi 2	:	Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas
2.	Misi 5	:	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bertanggung jawab, dan melayani didukung dengan aparatur birokrasi yang berintegritas dan profesional

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (2016)	Target Pencapaian (Tahun 2016-2021)					Target Akhir RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6					7
	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan Kabupaten	%	74,07	75,05	76,99	82,44	92,06	100	100
		Presentase terhubungnya pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten	%	60,14	69,10	78,06	87,02	95,97	100	100
		Presentase kondisi jalan mantap (perkerasan Beton)	%	21,02	37,66	54,30	70,94	87,57	100	100
		Presentase tingkat kondisi drainase Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten	%	66,87	68,75	71,72	74,50	77,09	80,04	80,04
		Presentase tingkat kondisi jembatan								

		Kabupaten dalam kondisi baik (proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten)	%	65	71	77	84	91	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan Jaringan Irigasi dan Sumber daya Air	Cakupan fungsi pelayanan jaringan Irigasi dalam Kondisi baik terhadap total areal Irigasi	%	90,01	95	97	98,80	99,40	100	100
		Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah ada	%	67	68	69	70	71	72	72
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang	%	100	100	100	100	100	100	100

A.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang

A.4.1 Strategi

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek

pembangunan 2016-2021. Strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa lima tahun mendatang.

Berpijak pada kondisi dan permasalahan serta tantangan pembangunan, isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten Serang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 adalah.

1. Ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur
2. Tata kelola pemernitahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1. Ruas jalan yang ditangani selalu dilakukan secara bertahap setiap tahunnya karena keterbatasan anggaran
2. Banyaknya jaringan irigasi baru yang dibangun oleh masyarakat.
3. Belum jelasnya kewenangan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Kabupaten

Strategi mengatasi isu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada Renstra 2016 – 2021 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan menyusun perda precepatan infrastruktur, agar ruas jalan ditangani secara utuh tidak lagi secara bertahap sehingga pada akhir periode Renstra dicapai jalan Kabupaten yang mantap 100%

A.4.2 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. **Memantapkan sarana dan prasarana transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa**
2. **Memantapkan sarana dan prasarana jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan pasokan air irigasi ke areal pertanian serta menumbuhkembangkan partisipasi P3A dalam pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangannya**
3. **Meningkatkan sumber daya air dengan titik berat konservasi, pendayagunaan dan pencegahan daya rusak air**
4. **Menyelenggarakan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku didukung dengan SDM yang berkualitas;**
5. **Meningkatkan kualitas aparatur dengan didukung Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai;**

B. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hal-hal yang perlu mendapat prioritas atau perhatian agar pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang dapat dilakukan secara efisien dan

efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka perumusan tujuan dan sasaran akan lebih terarah menuju tercapainya visi dan misi. Adapun faktor yang menentukan keberhasilan di dalam usaha pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas ;
2. Adanya etos kerja dan motivasi yang tinggi para aparatur ;
3. Tersedianya anggaran belanja aparatur dan belanja publik ;
4. Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran dari rencana yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang melalui kebijakan yang ditetapkan yaitu aspek penyelenggaraan pemerintah adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan yang mendapat legitimasi dari masyarakat yang tercermin dari meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan ini akan tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran apabila terlaksananya program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Program Penatagunaan Tanah
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan Kabupaten)	Bidang Bina Marga
	Presentase terhubungnya pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten	Bidang Bina Marga
	Presentase tingkat kondisi jalan mantap (perkerasan Beton)	Bidang Bina Marga
	Presentase tingkat kondisi drainase Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten)	Bidang Bina Marga
	Presentase tingkat kondisi jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten)	Bidang Bina Marga
Meningkatnya kualitas pelayanan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	Cakupan fungsi pelayanan jaringan Irigasi dalam Kondisi baik terhadap total areal Irigasi	Bidang Irigasi
	Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah ada	Bidang Irigasi
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang	Bidang Tata Ruang

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan Kabupaten)	100%
	Presentase terhubungnya pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten	100%
	Presentase tingkat kondisi jalan mantap (perkerasan Beton)	100%
	Presentase tingkat kondisi drainase Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten)	80,04%
	Presentase tingkat kondisi jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten)	100 %
Meningkatnya kualitas pelayanan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	Cakupan fungsi pelayanan jaringan Irigasi dalam Kondisi baik terhadap total areal Irigasi	100%
	Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah ada	72%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang	100%

F. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULAN				TARGET TAHUNAN
				1	2	3	4	
1	2	3	4	5				6
	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan Kabupaten	%	84,21	0	0	15,79	100
		Presentase terhubungnya pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten	%	95,97	0	0	4,3	100
		Presentase tingkat kondisi jalan mantap (perkerasan Beton)	%	84,213	0	0	15,787	100
		Presentase tingkat kondisi drainase Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten	%	74,46	0	0	5,58	80,04
		Presentase tingkat kondisi jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (proporsi jumlah jembatan	%	93,3	0	0	6,7	100

		kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten)						
Meningkatnya kualitas pelayanan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	Cakupan fungsi pelayanan jaringan Irigasi dalam Kondisi baik terhadap total areal Irigasi	%	99,40	0	0	0,60	100	
Air	Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah ada	%	71	0	0	1	72	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang	%	25	25	25	25	100	

BAB III

**AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SERANG**

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

1. Cara Pengukuran Capaian Kinerja

Realisasi

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Rencana

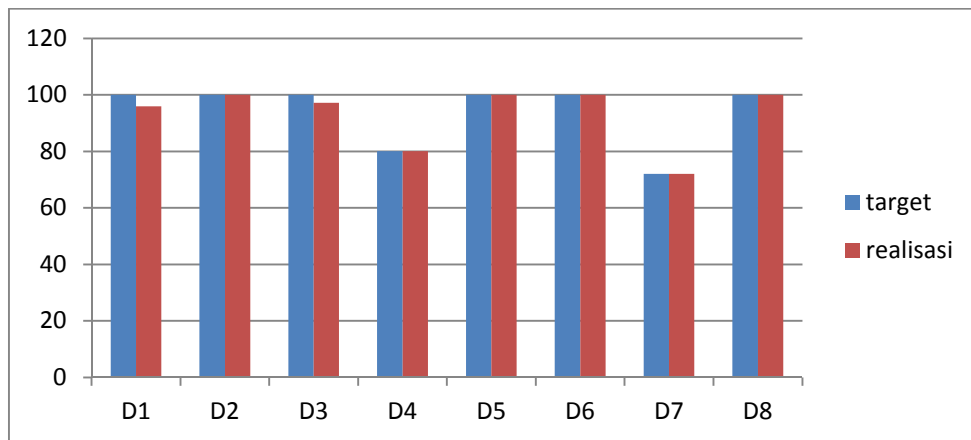
2. Skala Pengukuran dan Predikatnya

- Capaian Kinerja > 95 s/d 100 % = Sangat Berhasil
- Capaian Kinerja > 80 s/d 95 % = Berhasil
- Capaian Kinerja > 50 s/d 80 % = Cukup Berhasil
- Capaian Kinerja < 50 % = Tidak Berhasil
- Capaian di atas 100% masuk pada angka 100%
- Capaian di Bawah 0% masuk pada angka 0%

B. Capaian Pengukuran Kinerja / Kinerja Sasaran Strategis

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET	REALISASI	CAPKIN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan Kabupaten	%	100	95.91	95.91	Sangat Berhasil
		Presentase terhubungnya pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten	%	100	100	100	Sangat berhasil

		Presentase tingkat kondisi jalan mantap (perkerasan Beton)	%	100	97,17	97,17	Sangat berhasil
		Presentase tingkat kondisi drainase Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten)	%	80,04	80,04	100	Sangat berhasil
		Presentase tingkat kondisi jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten)	%	100	100	100	Sangat Berhasil
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Cakupan fungsi pelayanan jaringan Irigasi dalam Kondisi baik terhadap total areal Irigasi	%	100	100	100	Sangat berhasil
	Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah ada	%	72	72	100	Sangat berhasil
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang	%	100	100	100	Sangat berhasil
	Total Rata –Rata Capaian Kinerja					100	Sangat Berhasil



Gambar 3.1 Grafik perbandingan target dan Capaian IKU 2021

Keterangan Gambar 3.1

- D1 = Presentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten)
- D2 = Peersentase terhubungnya pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten
- D3 = Persentase kondisi jalan mantap (perkerasan beton)
- D4 = Persentase tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten)
- D5 = Persentase tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik (proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten)
- D6 = Cakupan fungsi pelayanan jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap total areal irigasi
- D7 = Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah ada
- D8 = Persentase Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang

C. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis



2021

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis



2021

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis capaian kinerja terhadap sasaran :

Dibandingkan dengan tahun lalu

Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan. Diperoleh pencapaian 95,91 % dengan predikat sangat berhasil dan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Sedang	88,73%	100	95,91	95,91



Gambar 3.2 Rekonstruksi Jalan Kadugenep – Panunggulan (DAU)

Terbangunnya pusat-pusat kegiatan & pusat produksi Diperoleh pencapaian 100 % dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terhubungnya pusat-pusat kegiatan & pusat produksi	95,97%	100	100	100

Terbangunnya Jalan Kabupaten dengan kontruksi Beton. Diperoleh pencapaian 97,17 % dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase tingkat kondisi jalan mantap (perkerasan Beton)	84,213	100	97,17	97,17



Gambar 3.3 Rekonstruksi Jalan Mandaya – Walikukun (DAU)

Terpeliharanya Drainase dalam kondisi baik dan sedang. Diperoleh pencapaian 80,04 % dengan predikat cukup berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase tingkat kondisi drainase Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi Panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total Panjang drainase Kabupaten)	74,5%	80,04	80,04	100

Catatan : Rencana Pembangunan Sal Drainase sebanyak 2 paket
Dan Peningkatan Sal Drainase sebanyak 4 paket

Terbangunnya Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik. Diperoleh pencapaian 100% dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase tingkat kondisi jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jembatan kabupaten)	93,3%	100	100	100

Catatan : - Rencana Pembangunan jembatan = 7 buah
- Rencana Pelebaran Jembatan = 5 buah



Gambar 3.4 Pelebaran Jembatan Nyompok Desa Nyompok



Gambar 3.5 Pembangunan Jembatan Sukaratu Tahap 2

Terpeliharanya jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Diperoleh pencapaian 100% dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan fungsi pelayanan jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap total areal irigasi	99,40%	100	100	100



Gambar 3.6 DI.Cicongkok (DAU)

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat diperoleh pencapaian 100% dengan predikat sangat hasil perhitungan sebagai berikut :

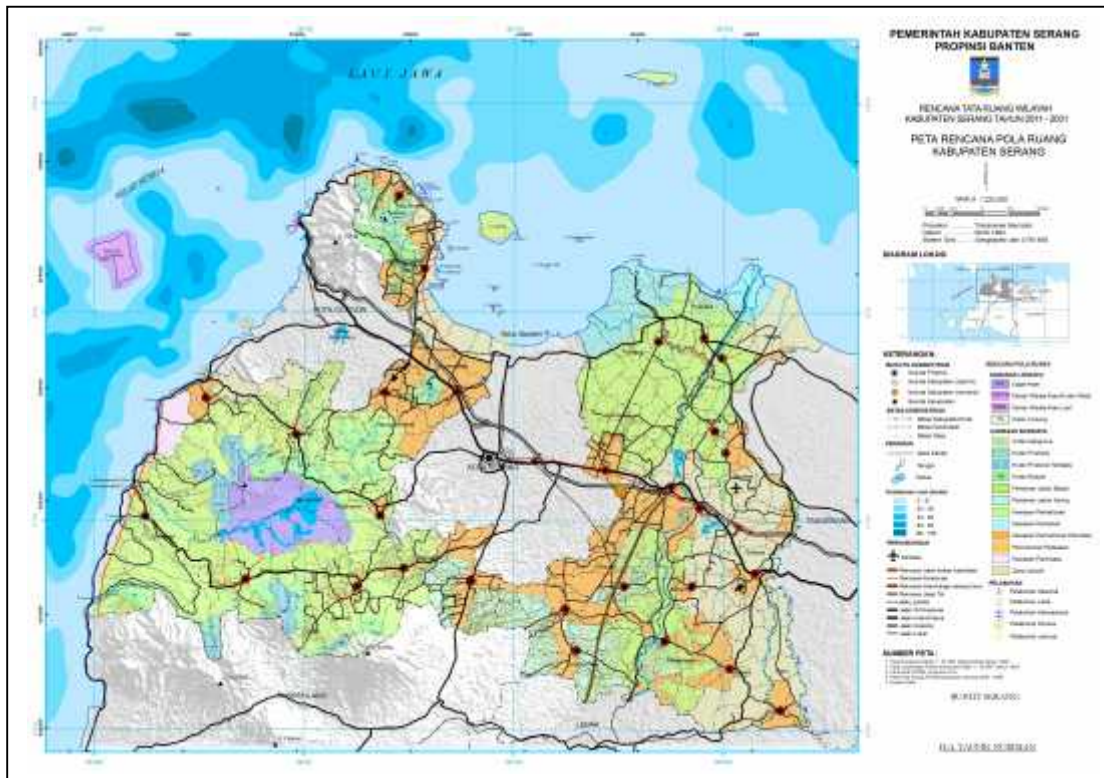
NO	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	71 (56 Ltr/dtk)	72 (57Ltr/dtk)	72 (57Ltr/dtk)	100



Gambar 3.7 DI.Telagawangsa

Persentase Pemanfaatan Ruang diperoleh pencapaian 100% dengan predikat sangat berhasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang	100%	100	100	100



Gambar 3.8 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Serang

Analisis Capaian Kinerja terhadap sasaran :

Perbandingan tahun 2021 dengan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Jalan Kabupaten. Diperoleh pencapaian 95,91 % dengan sangat predikat berhasil dan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi (%)					Tahun 2021(%)		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Sedang	65,68	76,90	83	88,90	88,73	100	95,91	95,91

Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten yang didanai oleh DAU, DAK, dan Bangub menjadikan jalan Kabupaten kondisinya menjadi mantap.

2. Terhubungnya pusat-pusat kegiatan & pusat produksi di wilayah Kabupaten. Diperoleh pencapaian 100 % dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi (%)					Tahun 2021 (%)		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
	Terhubungnya pusat-pusat kegiatan & pusat produksi di wilayah Kabupaten	60	69	78,06	87,02	95,97	100	100	100

3. Terbangunnya Jalan Kabupaten dengan kontruksi Beton. Diperoleh pencapaian 97,17 % dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi (%)					Tahun 2021 (%)		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
	Presentase tingkat kondisi jalan mantap (perkerasan Beton)	21	30,12	60,95	79,21	84,21	100	97,17	97,17

Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten yang didanai oleh DAU, DAK, dan Bangub menjadikan jalan Kabupaten kondisinya menjadi mantap.

4. Terpeliharanya Drainase Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang. Diperoleh pencapaian 100 % dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi (%)					Tahun 2021 (%)		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
	Presentase tingkat kondisi drainase Kabupaten dalam kondisi baik & sedang (proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik & sedang terhadap total Panjang drainase Kabupaten)	66,87	68,75	71,72	74,5	74,5	80,04	80,04	100

Dengan adanya Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase kabupaten menjadikan air hujan dapat mengalir pada saluran yang ada. Saluran dan bahu jalan menjadi bersih.

5. Terbangunnya Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik. Diperoleh pencapaian 100% dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi (%)					Tahun 2021 (%)		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
	Presentase tingkat kondisi jembatan Kabupaten dalam	71,5	68,75	77,9	92,12	93,3	100	100	100

kondisi baik (proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jembatan kabupaten)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Meningkatnya kualitas Jembatan kabupaten yang kondisinya kokoh yang didanai dari APBD Kabupaten mengakibatkan umur konstruksi jembatan menjadi panjang dan lalu lintas yang melewati jembatan tersebut menjadi nyaman.

6. Terpeliharanya jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Diperoleh pencapaian 100% dengan predikat Sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi (%)					Tahun 2021 (%)		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
	Cakupan fungsi pelayanan jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap total areal irigasi	90	92	97	98,8	99,40	100	100	100

Dengan adanya Rehabilitasi / pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Serang yang didanai oleh APBD Kabupaten / DAK / BANGUB, menjadikan saluran irigasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya

7. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat diperoleh pencapaian 100% dengan predikat sangat berhasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi (%)					Tahun 2020 (%)		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
	Capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	65	68	69	70	71	72	72	100
		50 ltr/dtk	53 ltr/dtk	54 ltr/dtk	55 ltr/dtk	56 ltr/dtk	57 ltr/dtk	57 ltr/dtk	

Dengan adanya Rehabilitasi / pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Serang yang didanai oleh APBD Kabupaten / DAK , menjadikan saluran irigasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat dapat terlayani.

8. Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang diperoleh pencapaian 100% dengan predikat Sangat berhasil perhitungan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Realisasi (%)					Tahun 2021 (%)		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang	0	100	100	100	100	100	100	100

Dengan adanya kegiatan Pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Serang akan selalu menyajikan tentang temuan lapangan, penilaian terhadap perijinan pemanfaatan ruang dan penilaian kesesuaian fungsi kegiatan dan kesesuaian dengan siteplan. Kegiatan ini didanai oleh APBD Kabupaten Serang.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

1. Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai peraturan

2. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada
3. Adanya sosialisasi kepada masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan.
4. Adanya koordinasi dengan instansi – instansi yang terkait dengan pembangunan
5. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Hambatan / permasalahan :

- Rencana Pembangunan Sal Drainase sebanyak 2 paket dan Pemeliharaan Sal Drainase sebanyak 4 paket
- Rencana Pembangunan jembatan = 2 buah dan rencana Peningkatan Jembatan = 12 buah

D. Realisasi Anggaran

Rincian anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataanruang Kabupaten Serang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

D 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang Tahun 2021

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN :			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260.000.000,00	80.200.000	30,85
Jumlah	260.000.000,00	80.200.000	30,85
BELANJA TIDAK LANGSUNG :			
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.169.728.515,00	8.758.740.190,00	95,52
Tunjangan Keluarga	957.700.000,00	927.916.546	96,89
Tunjangan Jabatan	387.400.000,00	381.370.000,00	98,44
Tunjangan Fungsional	403.100.000,00	396.615.000,00	98,39
Tunjangan Beras	624.200.000,00	608.400.418,00	97,47
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.150.000,00	2.144.418,00	99,74
Pembulatan Gaji	200.000,00	132.084,00	66,04
Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS)	719.400.000,00	675.818.720,00	93,94
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	18.400.000,00	17.890.391,00	97,23

Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	55.000.000,00	53.670.783,00	97,58
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.811.700.000,00	10.686.312.000,00	90,47
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	0	0	0
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0
Jumlah	24.148.978.515,00	22.509.010.550,00	93,79
BELANJA LANGSUNG :			
Belanja Pegawai	26.273.446.515,00	24.328.915.550,00	92,60
Belanja Barang Jasa	88.824.367.052,00	77.439.016.908,00	87,18
Belanja Modal	318.595.990.921,00	309.125.924.929,00	97,03
Jumlah	433.693.804.488,00	410.893.857.387,00	94,74

D2. Realisasi Capaian Keuangan Tahun 2021 per kegiatan

NO	Program dan Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Keu (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	860.689.748	810.114.453	94,12
		2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	111.240.000	102.720.000	92,34
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661.126.804	494.895.000	74,86
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.187.296.515	22.509.010.550	93,06
		2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	204.660.000	189.750.000	92,71
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	182.250.000	168.150.000	92,26

- Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.072.370	17.927.000	99,20
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	806.029.881	730.635.000	90,65
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	409.237.700	389.184.000	95,10
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.412.700	161.240.000	98,67
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	82.050.000	77.790.000	94,81
	6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.068.000	104.708.000	99,66
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	623.455.000	346.871.852	55,64
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.607.129.820	1.562.650.300	97,23
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	271.170.000	262.910.800	96,95
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	715.308.900	620.108.000	86,69
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.714.382	96.685.000	50,96
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	125.895.000	65.745.000	52,22

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	614.071.540	383.500.000	62,45
	- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	118.220.000	99.480.000	84,15
		2. Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	51.120.000	46.860.000	91,67
		3. Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	25.560.000	23.430.000	91,67
	- Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	56.056.000	0	0
		2. Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	40.000.000	7.420.000	18,55
	- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1. Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	62.440.000	38.010.000	60,87
		2. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha,	1.148.937.500	1.112.455.000	96,82

		Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	343.962.500	313.791.900	91,23
		2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	1.079.322.500	1.026.225.400	95,08
		3. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	1.489.098.750	1.160.474.300	77,93
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	2.859.596.700	2.039.268.130	71,31
		2. Pengelolaan Leger Jalan	979.910.000	945.859.000	96,53
		3. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	676.831.000	646.202.500	95,47
		4. Rekonstruksi Jalan	334.405.861.680	322.115.430.164	96,32
		5. Pemeliharaan Rutin Jalan	9.050.536.615	8.493.508.600	93,85
		6. Pembangunan Jembatan	3.785.968.650	2.555.440.523	67,50
		7. Pelebaran Jembatan	1.109.355.100	845.912.050	76,25

		8. Pemeliharaan Rutin Jembatan	704.513.751	539.727.000	76,61
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	1. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.805.087.450	1.379.958.400	76,45
		2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	151.504.000	150.664.000	99,45
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	600.000.000	599.769.900	99,96
		2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	315.300.000	249.760.800	79,21
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	365.429.820	327.740.500	89,69
		2. Sistem Informasi Penataan Ruang	274.235.000	260.098.180	94,84
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	349.036.000	248.153.000	71,10
		2. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	206.223.000	150.106.000	72,79

		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	160.170.000	157.253.880	98,18
	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	4.896.620.469	4.247.278.001	86,74
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 3. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 4. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 5. Operasional Unit Pengelola Irigasi	10.763.978.021 2.185.551.480 526.944.000 1.498.402.500 7.074.295.578	10.054.708.176 2.122.411.980 491.930.000 1.449.863.000 6.450.322.913	93,41 97,11 93,36 96,76 91,18
	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung,	200.000.000	193.809.000	96,90

(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	dan Bangunan Penampung Air Lainnya				
	2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.029.213.000	713.081.150	69,28	
	3. Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	49.999.500	18.634.400	37,27	
	4. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	86.340.000	86,34	
	5. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	483.092.000	96,62	
	6. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.000.000.000	951.585.000	95,16	
	7. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.033.904.341	1.703.290.369	83,76	
	8. Normalisasi/Restorasi Sungai	1.141.031.500	1.114.476.050	97,67	
	9. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	500.000.000	492.191.435	98,44	
	10. Pembinaan dan Pemberdayaan		228.664.000	86,94	

		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	263.021.773		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	4.607.974.950	4.346.545.000	94,33
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	1. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1.170.713.000	1.118.040.731	95,50

D.3 ALOKASI ANGGARAN PENGELUARAN UNTUK SETIAP PROGRAM

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pencapaian %	Ket
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	31.323.806.820	28.711.094.955	91,66	

2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.116.405.040	1.711.155.000	80,85	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.520.358.700	6.847.036.600	91,05	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	354.743.286.496	339.299.388.698	95,65	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.226.985.270	3.523.504.660	83,36	
6	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	4.896.620.469	4.247.278.001	86,74	
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	28.866.341.693	26.554.399.473	91,99	
	TOTAL	433.693.804.488	410.893.857.367	94,74	

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program melalui kegiatan - kegiatan yang berada dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah cukup memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran. Program - program tersebut telah berhasil di manfaatkan oleh masing – masing bagian/bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan penataanruang dan pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan kegiatan dari sisi anggaran sudah melakukan efisiensi anggaran. Adapun sisa anggaran 2021 sebesar 5,26% dimana 3,49 % adalah anggaran meluncur ketahun 2022, dan sisanya 1,77 % adalah efisiensi. dan dari sisi keberhasilan kegiatan pelaksanaannya mencapai **94,74 %**

E. Dampak Terhadap Sasaran Strategis

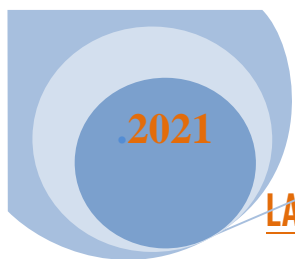
SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA	DAMPAK (IMPACT)
Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan	<p>Indikator kinerja pada sasaran strategis menitik beratkan pada jaringan jalan dengan perkerasan beton di TA 2021 dengan panjang 23,274 Km dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekonstruksi Jalan Mancak - Cikedung Kecamatan Mancak P= 2.200 m' L= 0 M' - Rekonstruksi Jalan Raab - Sadang Kecamatan Kibin P=1.466 m' L= 3,5 dan 4,6m - Rekonstruksi Jalan Sadang - Serdang Kecamatan Kibin dan Bandung P= 3.629m' L= 4m - Rekonstruksi Jalan Tamiang - Cibetik Kecamatan Gunungsari p= 2.100 m' L= m - Rekonstruksi Jalan Warung Bandrek - Wewuluh Kecamatan Carenang dan Binuang p= 2.335 m' L= 5m' - Rekonstruksi Jalan Wewuluh - Mekarsari Kecamatan Carenang dan Binuang p= 1.461m' L= 4,5m - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Padarincang - Cinangka (2020-2021) P= 12.822,5m' L= 5m - Peningkatan Jalan Rangkaspanjang - Cimaung Kec. Kragilan dan Cikeusa l(2020 - 2021) p= 6.149m' L= 5m - Peningkatan Jalan Penghubungan Kec. Mancak - 	<p>Jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan kontruksi beton menjadikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umur jalan menjadi panjang, - Menjadikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan - Tingkat Kecelakaan Menurun - Perekonomian masyarakat meningkat - Tingkat kecepatan dan waktu tempuh menjadi singkat. Dengan rincian hasil perhitungan LHR sebagai berikut : - Rekonstruksi Jalan Mancak - Cikedung Kecamatan Mancak LHR semula 2539 menjadi 4739 - Rekonstruksi Jalan Raab - Sadang Kecamatan Kibin LHR semula 1791 menjadi 2257 - Rekonstruksi Jalan Sadang - Serdang Kecamatan Kibin dan Bandung LHR semula 1870 menjadi 5499 - Rekonstruksi Jalan Tamiang - Cibetik Kecamatan Gunungsari LHR semula 1759 menjadi 3859 - Rekonstruksi Jalan Warung Bandrek - Wewuluh Kecamatan Carenang dan Binuang LHR semula 1969 menjadi 4304 - Rekonstruksi Jalan Wewuluh - Mekarsari Kecamatan Carenang dan Binuang LHR semula 2250 menjadi 3711 - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Padarincang - Cinangka (2020-2021) LHR semula 4535 menjadi 17357

	<p>Anyer (2020-2021) p= 6.137m' L= 5 & 4 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Ciruas dan Lebakwangi (2020 - 2021) p= 15.554 m' L= m - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Cikande dan Binuang (2020 - 2021) P= 7.200m' L= 4 & 5m - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Tanara (2020-2021) p= 6.700m' L= m - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Mancak (2020-2021) P= 6.063m' L = m - Rekonstruksi Jalan Babadan - Purwadadi Kecamatan Lebakwangi p= 1.200m' L= 5m - Rekonstruksi Jalan Cikande - Garut - Kopo Kecamatan Cikande & Kopo p= 120m' L= m - Rekonstruksi Jalan Cikolelet - Rancasanggal Kecamatan Cinangka p= 717m' L= 3m - Rekonstruksi Jalan Cokop Sulanjana - Gunung Sari Kecamatan Gunungsari & Waringinkurung p= 668m' L= 4m - Rekonstruksi Jalan Junti - Binong Kecamatan Cikande, Jawilan & Pamarayan p= 140m' L= m - Rekonstruksi Jalan Kadugenep - Panunggulan Kecamatan Petir & Tunjung Teja p= 258m' L= 4m 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Jalan Rangka panjang - Cimaung Kec. Kragilan dan Cikeusa I (2020 - 2021) LHR semula 3564 menjadi 9713 - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Mancak - Anyer (2020-2021) LHR semula 1785 menjadi 7922 - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Ciruas dan Lebakwangi (2020 - 2021) LHR semula 3132 menjadi 18851 - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Cikande dan Binuang (2020 - 2021) LHR semula 2539 menjadi 9739 - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Tanara (2020-2021) LHR semula 3545 menjadi 10245 - Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Mancak (2020-2021) LHR semula 1870 menjadi 7923 - Rekonstruksi Jalan Babadan - Purwadadi Kecamatan Lebakwangi LHR semula 1920 menjadi 2120 - Rekonstruksi Jalan Cikande - Garut - Kopo Kecamatan Cikande & Kopo LHR semula 1539 menjadi 1659 - Rekonstruksi Jalan Cikolelet - Rancasanggal Kecamatan Cinangka LHR semula 1690 menjadi 2407 - Rekonstruksi Jalan Cokop Sulanjana - Gunung Sari Kecamatan Gunungsari & Waringinkurung LHR semula 908 menjadi 1576 - Rekonstruksi Jalan Junti - Binong Kecamatan Cikande, Jawilan &
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonstruksi Jalan Kemuning - Telagaluhur Kecamatan Waringinkurung p= 320m' L = m - Rekonstruksi Jalan Malangghah - Kemuning Kecamatan Tunjung Teja p= 500m' L = 4m - Rekonstruksi Jalan Mancak - Ciwarna Kecamatan Mancak p= 314m' L= 4m - Rekonstruksi Jalan Mandaya - Walikukun Kecamatan Careng p= 317m' L= 4m - Rekonstruksi Jalan Pabatan - Cimake Kecamatan Pabuaran p= 590m' L= 5m - Rekonstruksi Jalan Sentul - Kisarap Kecamatan Kragilan & Cikeusal p= 590m' L= m - Rekonstruksi Jalan Sindanglaya - Cikolelet Kecamatan Cinangka p= 368m' L= 5m - Bronjong Ruas Jalan Cigodeg- Kisarap Kecamatan Cikeusal p= 28m' L= m - Bronjong Ruas Jalan Jaha- Sindangmandi Kecamatan Anyer p= 28m' L = m - Rekonstruksi Jalan Petir - Cimaung Kecamatan Cikeusal p= 30m' L=m - TPT Ruas Jalan Bismillah - Cibuntu Desa Barugbug Kecamatan Padarincang p= 58m' L= m - Rekonstruksi Jalan Kragilan – Cijeruk p= 125m' L= 4m - Akses Jalan Produksi Kp. Brangbang Desa Lontar p= 90m' L= 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> Pamarayan LHR semula 1680 menjadi 1820 - Rekonstruksi Jalan Kadugenep - Panunggulan Kecamatan Petir & Tunjung Teja LHR semula 1250 menjadi 2008 - Rekonstruksi Jalan Kemuning - Telagaluhur Kecamatan Waringinkurung LHR semula 1288 menjadi 1688 - Rekonstruksi Jalan Malangghah - Kemuning Kecamatan Tunjung Teja LHR semula 1281 menjadi 1781 - Rekonstruksi Jalan Mancak - Ciwarna Kecamatan Mancak LHR semula 1276 menjadi 1590 - Rekonstruksi Jalan Mandaya - Walikukun Kecamatan Careng LHR semula 1920 menjadi 2090 - Rekonstruksi Jalan Pabatan - Cimake Kecamatan Pabuaran LHR semula 1667 menjadi 2257 - Rekonstruksi Jalan Sentul - Kisarap Kecamatan Kragilan & Cikeusal LHR semula 1520 menjadi 2110 - Rekonstruksi Jalan Sindanglaya - Cikolelet Kecamatan Cinangka LHR semula 1969 menjadi 2337 - Bronjong Ruas Jalan Cigodeg- Kisarap Kecamatan Cikeusal LHR semula - menjadi - Bronjong Ruas Jalan Jaha- Sindangmandi Kecamatan Anyer LHR semula - menjadi - Rekonstruksi Jalan Petir - Cimaung Kecamatan Cikeusal LHR semula 2530 menjadi 2560
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Bronjong Jalan Cokop Sulanjana - Gunung Sari p= 16m' L= m - Akses Jalan Pasar Anyer p=55 m' L= m - Akses Jalan Pasar Padarincang p= 40m' L= 3m - TPT Jalan Desa Telaga Luhur p= 175m' L= m - TPT Jalan Jonjing - Bayak p=84 m' L= m - TPT Jalan Baros - Sindang Mandi p= 190m' L= m - Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bendung - Kemayungan Kecamatan Ciruas p= 3.090m' L= 5m - Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Dukuh - Teras Bendung Kecamatan Lebakwangi p= 1,876m' L= m - Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Karang - Bolong Jambu Kecamatan Cinangka p= 2.837m' L= 5m 	<ul style="list-style-type: none"> - TPT Ruas Jalan Bismillah - Cibuntu Desa Barugbug Kecamatan Padarincang LHR semula - menjadi - Rekonstruksi Jalan Kragilan – Cijeruk LHR semula 1320 menjadi 1445 - Akses Jalan Produksi Kp. Brangbang Desa Lontar LHR semula 150 menjadi 240 - Bronjong Jalan Cokop Sulanjana - Gunung Sari LHR semula - menjadi - Akses Jalan Pasar Anyer LHR semula 115 menjadi 170 - Akses Jalan Pasar Padarincang LHR semula 60 menjadi 100 - TPT Jalan Desa Telaga Luhur LHR semula -. menjadi - TPT Jalan Jonjing - Bayak LHR semula -. menjadi - TPT Jalan Baros - Sindang Mandi LHR semula -. menjadi - Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bendung - Kemayungan Kecamatan Ciruas LHR semula 1523 menjadi 4613 - Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Dukuh - Teras Bendung Kecamatan Lebakwangi LHR semula 2137 menjadi 4023 - Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Karang - Bolong Jambu Kecamatan Cinangka LHR semula 2462 menjadi 5299
Meningkatnya kualitas pelayanan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	Indikator kinerja pada sasaran strategis menitik beratkan pada Jaringan Iriagsi dalam kondisi baik seluas 1359,54. Ha dengan rincian kegiatan di TA 2021 adalah sbb : - Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik menjadikan : - Mendukung pemenuhan kedaulatan pangan. - Peningkatan fungsi atau menambah luas areal layanan

	<p>D.I Cikaduen</p> <ul style="list-style-type: none">- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikoneng- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cinenten- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Telagawangsa- Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DI. Cibanjir)- Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DI. Cikeusal)	<p>untuk mencapai sasaran nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta Ha, dan rehabilitasi irigasi 3 (tiga) juta Ha.</p>



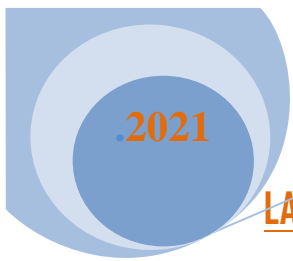
D. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	URUSAN	NO.	Indikator Sasaran	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Pekerjaan Umum	1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Sedang	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100 \%$ $\frac{576,55 \text{ km}}{601,13 \text{ km}} \times 100 \%$	95,91%	Bidang Bina Marga
		2	Terhubungnya pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	$\frac{\text{Pjg Jl yg sudah terhubung dgn pusat keg & prod}}{\text{Panjang total Jalan Kab}} \times 100 \%$ $\frac{601,13 \text{ km}}{601,13 \text{ km}} \times 100$	100 %	Bidang Bina Marga
		3	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Mantap (Perkerasan Beton)	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan Yang Dibeton}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut}} \times 100 \%$ $\frac{584,12 \text{ Km}}{601,13 \text{ Km}} \times 100 \%$	97,17 %	Bidang Bina Marga

2021

LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

		4	proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase Kabupaten	<p>Jumlah Panjang Drainase yang di pelihara ----- x 100 % Panjang seluruh Drainase Kabupaten di daerah tersebut</p> <p><u>93,65 Km</u> 117 Km x 100 %</p>	80,04 %	Bidang Bina Marga
		5	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten	<p>Jumlah Jembatan yang ditingkatkan ----- x 100 Total Jembatan Kabupaten di daerah tersebut</p> <p><u>165 bh</u> x 100 165 bh</p>	100 %	Bidang Bina Marga
		6	Capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	<p>Luas irigasi yg tersedia utk pertanian rakyat Ha x 1.20 lt/dt ----- x 100 % Luas Irigasi Kabupaten Ha x 1.20 lt/dt</p> <p><u>13.630 Ha x 1.20 lt/dt</u> x 100 18.919,10 ha x 1.20 lt/dt</p>	72 % (57 ltr/dtk)	Bidang Irigasi
		7	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	<p>Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ----- x 100 % Luas irigasi kabupaten</p> <p><u>18.919,10. Ha</u> x 100 % 18.919,10. Ha</p>	100 %	Bidang Irigasi



LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

		8	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang	Kegiatan setiap tahun rutin dilaksanakan dengan hasil Kesesuaian dengan rencana Tata Ruang	100 %	Bidang Tata Ruang
--	--	----------	--	--	-------	-------------------

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja dari bab III dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang dapat dikategorikan sangat berhasil ada 8 indikator, Sedangkan total secara keseluruhan pencapaian kinerjanya dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Diharapkan capaian program dan kebijakan ditahun mendatang akan mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun hasil evaluasi penyerapan anggaran pencapaiannya dapat disimpulkan bahwa program yang ada berjumlah 7 buah, kegiatan berjumlah 21 buah. Sedangkan penyerapan anggaran belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp. 410.893.857.387,- (94,74%).

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang setiap tahunnya, dimana anggaran itu merupakan kristalisasi dari prioritas dan pencapaian sasaran yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Demikian laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang yang dapat disampaikan sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.